

**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP
KETERLAMBATAN PENERBITAN TANDA NOMOR
KENDARAAN BERMOTOR (TNKB) DI TINJAU DARI PASAL
4 HURUF (H) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
DI PANGKALPINANG**

SKRIPSI



Oleh :

ARIS SUTIONO

NIM. 401.12.11.010

Konsentrasi : Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2017**

**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP
KETERLAMBATAN PENERBITAN TANDA NOMOR
KENDARAAN BERMOTOR (TNKB) DITINJAU DARI PASAL
4 HURUF (H) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI
PANGKALPINANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh :

ARIS SUTIONO

NIM. 401.12.11.010

Konsentrasi : Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2017**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : ARIS SUTIONO

Nim: : 401.12.11.010

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi :

**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP
KETERLAMBATAN PENERBITAN TANDA NOMOR
KENDARAAN BERMOTOR (TNKB) DITINJAU DARI PASAL
4 HURUF (H) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI
PANGKALPINANG**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tat tertib Universitas Bangka Belitung.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar dan tanpa ada paksaan.

Yang bertanda tangan dibawah



ARIS SUTIONO

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP
KETERLAMBATAN PENERBITAN TANDA NOMOR
KENDARAAN BERMOTOR (TNKB) DITINJAU DARI PASAL
4 HURUF (H) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI
PANGKALPINANG**

SKRIPSI

Oleh :
ARIS SUTIONO
NIM. 401.12.11.010
Konsentrasi : Keperdataan

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



(Syamsul Hadi, S.H, M.H)
NP. 608010028

Pembimbing Pendamping



(Sigit Nugroho, S.H, M.H)
NIP. 198402102012121005

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung



(Rio Armanda Agustian, S.H., MH)
NIP. 608410029

HALAMAN PENGESAHAN

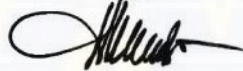
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP
KETERLAMBATAN PENERBITAN TANDA NOMOR KENDARAAN
BERMOTOR (TNKB) DI TINJAU DARI PASAL 4 HURUF (H)
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DI PANGKALPINANG**

SKRIPSI

Oleh:
ARIS SUTIONO
NIM: 401 12 11 010
Konsentrasi: Keperdataan

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji
Pada 18 Januari 2017
Dan Dinyatakan **LULUS**

Majelis Penguji
Ketua



(Syamsul Hadi, SH.,MH)
NP. 606007014

Anggota I

Anggota II



(Yokotani, SH.,MH)
NP.606206003



(Sigit Nugroho, SH.,MH)
NIP. 198402120201212005

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)
NP. 606007014

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Ingat

Berjuang dan berkerja keras selagi jiwamu muda

Dan ingatlah

Tidak ada kesuksesan tanpa melalui kesungguhan dalam meraih suatu

keberhasilan

Serta yakin bahwa hasil yang kita peroleh akan bermanfaat di hari tua

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Ibu dan Ayahku tercinta yang selalu memberi kasih sayang yang tiada henti, selalu memberikan motivasi untuk saya.
- Saudara-saudara dikampung halaman yang tercinta yang selalu mendukung dan mendoakanku.
- Untuk sahabat seperjuangan di Universitas Bangka Belitung yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu karena memang banyak. Terima kasih atas kebersamaan dan kekeluargaan yang kalian berikan.
- Dosen UBB Fakultas Hukum yang telah memberikan pengetahuan dan ilmunya.
- Untuk Cici Tarnuzila S.pd. yang selalu berkenan di hati hari ini besok dan selamanya.

ABSTRAK

Aris Sutiono

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KETERLAMBATAN PENERBITAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (TNKB) DI TINJAU DARI PASAL 4 HURUF (H) UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI PANGKALPINANG

Skripsi, Fakultas Hukum, 2017

Kata kunci : Pertanggungjawaban, Pelaku usaha, konsumen

Pelaku usaha adalah orang atau perorangan yang memiliki usaha baik di bidang penjualan barang maupun jasa. Penjualan kendaraan bermotor dilakukan oleh badan usaha yang sering disebut dengan dealer dan terkait semua kebutuhan konsumen menjadi tanggungjawab pihak dealer baik itu barang maupun jasa sehingga ketika ada hak konsumen yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen tidak terpenuhi maka konsumen dapat meminta kompensasi atau ganti rugi. Tujuan penelitian untuk mengetahui tanggungjawab pelaku usaha atau instansi terkait dan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari permasalahan keterlambatan pendistribusian TNKB. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban pelaku usaha yaitu berkoordinasi dengan pihak SAMSAT dan memberikan surat rekomendasi sebagai bukti bahwa TNKB sedang diproses dan jika memang terbukti pelaku usaha sengaja atau lalai sehingga mengakibatkan kerugian maka pelaku usaha harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaku usaha melakukan wanprestasi yaitu melaksanakan tetapi tidak tepat waktu sehingga akibat hukum yang timbul pelaku usaha dapat dituntut sesuai dengan kerugian yang dialami konsumen. Pelaku usaha dapat dilaporkan ke yayasan yang memiliki hak dalam menangani kasus perlindungan konsumen dan ketika yang melakukan kesalahan adalah pihak SAMSAT maka pelaku usaha beserta konsumen dapat melaporkannya kepada Ombudsman yang menangani masalah Maladministrasi.

ABSTRACT

Aris Sutiono

ACTORS OF LIABILITY FOR DELAY PUBLISHING BUSINESS NUMBER SIGN OF MOTOR VEHICLES (TNKB) ON REVIEW OF ARTICLE 4 LETTERS (H) LAW NUMBER 8 YEAR 1999 ON CONSUMER PROTECTION IN PANGKALPINANG

Thesis, Faculty of Law, 2017

Keywords: Accountability, business agent, consumers

Business actors are people or individuals who have good business in selling goods or services. Sales of vehicles made by a legal entity which is often called the dealer and related all consumer needs is the responsibility of the dealer both goods and services, so that when there is the right of consumers that have been regulated in Law No. 8 on Consumer Protection is not met, then the consumer can ask for compensation or compensation. The aim of research to determine the responsibility of business operators or other related agencies and to determine the legal consequences arising from the delay in the distribution TNKB problems. This type of research is empirical juridical whereas the method used in the study is a case approach. The results showed that the perpetrators attempt to coordinate with the SAMSAT and provide a recommendation letter as evidence that TNKB being processed and if it is proven businesses intentionally or negligently causing losses so businesses must account for his actions. The results also showed that businesses that are in default but not timely execute legal consequences arising so that businesses can be prosecuted in accordance with the losses experienced by consumers. Entrepreneurs may be reported to the foundation which has the right to handle the case of consumer protection and when that making mistakes is part SAMSAT then businesses and their consumers can report to the Ombudsman that deal with maladministration

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan yang sebesar-besarnya kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Skripsi ini berjudul **“Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Keterlambatan Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) di Tinjau Dari Pasal 4 Huruf (H) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Pangkalpinang .”**

Penulis menyadari segala keterbatasan atas kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, jika dalam penulisan skripsi ini pembaca menemukan kekurangan-kekurangan baik dalam isi materi maupun dalam susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumi atas kekurangan-kekurangan tersebut, serta segala saran dan kritik maupun masukan lainnya dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan skripsi ini ke arah yang lebih sempurna.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat pada waktunya, yaitu :

1. Bapak Dr. Ir. Muh Yuusuf. Msi., selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.

2. Bapak Syamsul Hadi, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan menyediakan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam penulisan ini.
3. Bapak Toni, SH., MH., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Bapak Rio Armanda Agustian, SH., MH., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung.
5. Bapak Sigit Nugroho, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang berkenan untuk membimbing dan mengarahkan dalam penulisan ini.
6. Ibu Yokotani, SH., MH., selaku pembimbing Akademik yang selalu berkenan memberi ilmu selama belajar di Fakultas Ilmu Hukum.
7. Staf Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis.
8. Bapak Jumli Jamalludin Kepala Ombudsman Daerah Kepulauan Bangka Belitung yang telah berkenan memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian.
9. Bapak Jeckson Ricsko Hutafea Direktur Lalu Lintas Polda Daerah Kepulauan Bangka Belitung yang telah bersedia untuk diwawancara dan memberikan data dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Dan dapat menambah pengetahuan kita serta semoga Universitas Bangka Belitung ini dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan dapat membangun peradaban bagi Provinsi Bangka Belitung.

Akhir kata penulis ucapkan Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.

Pangkalpinang, 5 Januari 2017

Penulis

ARIS SUTIONO



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERNYATAAN	Ii
HALAMAN PERSETUJUAN	Iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	Iv
ABSTRAK	V
ABSTRACK	Vi
KATA PENGANTAR	Vii
DAFTAR ISI	X
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Teori	10
E. Metode Penelitian	20
BAB II PERLLINDUNGAN KONSUMEN, PELAKU USAHA, DAN PERTANGGUNGJAWABAN	25
A. Perlindungan Konsumen	25
1. Pengertian Konsumen	25
2. Hak dan Kewajinam Konsumen	30
3. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	35
4. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	38

B. Pelaku Usaha	42
C. Pertanggungjawaban	51
1. Pengertian Pertanggungjawaban	51
2. Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	52
3. Perbuatan Melawan Hukum.....	53

**BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP
KETERLAMBATAN PENERBITAN TANDA NOMOR
KENDARAAN BERMOTOR (TNKB) DI TINJAU DARI
PASAL 4 HURUF (H) UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

.....	56
A. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Keterlambatan Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) di tinjau dari pasal 4 huruf (h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.....	56
B. Akibat Hukum Terhadap Keterlambatan Penerbitan Serta Distribusi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Oleh Pelaku Usaha dan Instansi Terkait	66

BAB IV PENUTUP	78
Kesimpulan	78
Saran	79

DAFTAR PUSTAKA 81

LAMPIRAN

